

ABSTRAK

Dinamika Politik dapat berlangsung dalam segala bidang baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh Dinamika Politik yang terjadi terhadap Pencabutan Izin Pembangunan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta yang berlangsung disebabkan adanya kepentingan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI dan Masyarakat pesisir Pantai Utara Jakarta.

Penelitian ini fokus pada Pencabutan Izin Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta dengan menganalisis terhadap Dinamika Politik yang berlangsung disebabkan dengan adanya kepentingan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI, dan Masyarakat Pantura Jakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan data diperoleh secara kualitatif berupa hasil wawancara dengan Narasumber yang paham dan berkaitan langsung dengan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Konsep yang digunakan yaitu Konsep Dinamika Politik di dalam Proses Pencabutan Izin Pembangunan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dinamika Politik yang terjadi disebabkan dengan adanya kepentingan-kepentingan dibaliknya maka diperoleh hasil terhadap Pencabutan Izin Pembangunan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh dan observasi peneliti yang menjelaskan awal mula Reklamasi Teluk Jakarta dicetuskan, adanya perdebatan antara pihak pro dan kontra terhadap Reklamasi Teluk Jakarta, tarik ulur kebijakan, serta strategi yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Kesimpulan yang dapat diambil dari terhadap Pencabutan Izin Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta yang dipengaruhi dengan adanya Dinamika Politik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Dinamika Politik, Reklamasi Teluk Jakarta.

ABSTRACT

Political Dynamics can take place in all fields such as social, cultural, economic, education, and even on health fields. One example that occur in is the presence of Political Dynamics towards Revocation of Permit for Construction of the Reclamation Island of Jakarta Bay which takes place due to the interests of the Central Government, DKI Provincial Government and North Coast Coastal Community Jakarta.

This study focused on Revoking the Jakarta Bay Reclamation Development Permit by analyzing the Political Dynamics that took place due to the interests of the Central Government, the DKI Provincial Government, and the Jakarta Pantura Community. The method used in this study is descriptive research with data obtained qualitatively in the form of interviews with informants who understand and are directly related to the Jakarta Bay Reclamation project. The concept used is the Concept of Political Dynamics in the Process of Revoking the Construction of the Reclamation Island of Jakarta Bay.

From the results of the study it was found that the Political Dynamics that occur due to the interests behind it obtained the results of Revocation of Permit for the Construction of the Reclamation Island of Jakarta Bay. Can be seen from the results of the data obtained and observations of researchers who explained the beginning of Jakarta Bay Reclamation was triggered, there was a debate between the pros and cons of the Jakarta Bay Reclamation, tugging policies, and strategies issued to achieve the objectives. Conclusions that can be drawn from the Revocation of the Jakarta Bay Reclamation Development Permit are influenced by the existence of Political Dynamics between the Central Government and the Regional Government.

Keywords: *Political Dynamics, Reclamation of Jakarta Bay.*